

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR
DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

**Ni Made Kertiani¹
Ni Putu Ayu Kusumawati²
Putu Cita Ayu³**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Bisnis Dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of performance-based budgeting and regional financial accounting systems on the performance of government agencies in government offices in Badung Regency. The population used in this study were all employees working in the Badung Regency Office as many as 1089 people. Determination of the sample using purposive sampling to obtain 102 people as samples. After testing the instrument and testing the classic assumptions, then the data analysis is performed using multiple linear regression analysis, determination, t test, and F test. The analysis showed that the effect of performance-based budgeting on the performance of government agencies obtained a regression coefficient of 0.133, tcount value of 2.291 and t test significance value of 0.024 <0.05, so that H1 was accepted, it can be concluded that performance-based budgeting has a positive and significant effect on the performance of government agencies in the Badung Regency Government Office. The influence of the regional financial accounting system on the performance of government agencies obtained a regression coefficient of 0.698, tcount of 14.181 and t test significance value of 0.000 <0.05, so H2 is accepted, it can be concluded that the regional financial accounting system has a positive and significant effect on agency performance government at the Badung Regency Government Office.

Keywords: *Performance-Based Budgeting, Regional Financial Accounting Systems, Government Agency Performance*

PENDAHULUAN

Saat ini masyarakat menuntut pemerintah memberikan kinerja yang optimal seperti mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang merupakan implikasi dari otonomi daerah dimana akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik selalu dikedepankan (Abdul, 2007). Pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi merupakan gambaran pencapaian suatu kegiatan yang telah

dilaksanakan suatu organisasi. Kinerja dapat diukur dari kemajuan hasil kerja yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan tingkat keefisienan penggunaan sumber daya dalam menghasilkan *output* yang baik serta membandingkannya dengan hasil kerja sebelumnya.

Adanya perspektif keuangan tidak hanya satu-satunya cara untuk mengukur peningkatan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan. Apalagi keberhasilan instansi yang bergerak dalam sektor pelayanan publik yang tidak hanya diukur dari pencapaiannya di bidang keuangan (Irvan, 2013). Sistem penentuan anggaran yang berkembang pesat saat ini dan adalah sistem penganggaran yang berbasis kinerja. Penggunaan sistem informasi secara sistematis dapat dicapai dengan penerapan *performance-based budgeting* dalam kaitannya dengan anggaran organisasi sektor publik (Robinson dan Last, 2009).

Pemerintah mengatur pelaksanaan anggaran berbasis kinerja melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah digunakan dalam pencatatan dan pelaporan oleh instansi pemerintah pada Pasal 232 dimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer

Hasil pengelolaan sistem anggaran sejak tahap penyusunannya selalu berhubungan dengan hasil yang akan dicapai. Fokus penerapan anggaran pada besarnya biaya yang akan dianggarkan, meningkat dari tahun sebelumnya ataupun sebaliknya. Tidak adanya tolak ukur untuk mengukur tercapainya kinerja

pelayanan publik membuat anggaran lebih diutamakan penyerapan anggaran daripada penghematan anggaran. Sehingga terjadi penggunaan anggaran yang tidak benar-benar diperlukan (Mardiasmo, 2009:84).

Proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dibuatkan pertanggung jawaban publik sehingga penerapan anggaran benar-benar diawasi dengan ketat. Sesuai dengan prinsip *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan benar-benar transparan dengan diterapkannya prinsip tersebut, untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain itu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah juga sangat menentukan kesuksesan instansi dalam menunjukkan kinerja yang baik. Sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dukungan yang kuat demi tercapainya kinerja pemerintah daerah yang baik. Keuangan daerah berkaitan dengan mencatat dan melaporkan seluruh transaksi pada instansi yang ditujukan untuk pelayanan publik (Wawan dan Lia, 2009).

Akhir-akhir ini banyak terjadi penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang dalam mengelola anggaran daerah, kinerja pemerintah daerah selalu dipertanyakan oleh masyarakat dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan. Adanya indikasi penyimpangan anggaran terutama terjadi pada kota besar dengan anggaran yang besar pula, salah satunya di Kabupaten Badung. Komitmen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Badung.

Dari hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Badung pada tahun 2017 meningkat dari nilai 76,37 menjadi 77,53 dan mendapatkan peringkat “BB” (sangat baik), predikat tersebut sama dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Bali secara keseluruhan yang mendapat predikat “BB”, dimana pemerintah Kabupaten Badung selangkah lagi akan meraih nilai tinggi A (dimuat dalam portal berita (<http://news.akurat.co/id>)).

Hasil yang didapat Pemerintah Kabupaten Badung cukup memuaskan, tetapi perlu adanya berbagai peningkatan untuk dapat mewujudkan nilai akuntabilitas keuangan yang lebih tinggi pada tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengusulkan berbagai perbaikan (*area of improvement*) yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Badung seperti struktur anggaran dan pedoman penyusunan anggaran (dimuat dalam portal berita <http://denpostnews.com>).

Selain permasalahan diatas dengan adanya laporan pisik secara umum realisasinya tidak terpenuhi, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari *stark order* sehingga instansi pemerintah tidak mencapai target. Anggaran kinerja menurut Mundar (2001;3) seluruh kegiatan yang disusun secara sistematis dalam mengendalikan keuangan secara periodik. Nafarin (2007, 11) mengungkapkan anggaran kinerja yaitu jumlah periodik yang merupakan rencana kegiatan suatu perusahaan yang dinyatakan dengan satuan mata uang atau dalam barang atau jasa. Masukan, keluaran, manfaat, dan hasil merupakan indikator dari kinerja

kegiatan yang dilaksanakan.

Sejalan dengan transparansi reformasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah kebutuhan kinerja juga meningkatkan pengukuran kinerja ini juga diperlukan sebagai informasi bagi instansi pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan jasa pelayanan publik, namun sejalan dengan semangat bekerja membangun daerah agar penilaian serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga meningkat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung”.

- 1) Apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja instansi pemerintah pada kantor dinas pemerintah di Kabupaten Badung?
- 2) Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap penilaian kinerja instansi pemerintah pada kantor dinas pemerintah di Kabupaten Badung?
- 1) Untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap penilaian kinerja instansi pemerintah pada kantor dinas pemerintah di Kabupaten Badung.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penilaian kinerja instansi pemerintah pada kantor dinas pemerintah di Kabupaten Badung.

Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat dipakai oleh ilmuan yang lain atau peneliti selanjutnya yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbahan terhadap kemajuan ekonomi khususnya pada anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga ilmu pengetahuan mengenai masalah yang diteliti.

Manfaat praktis merupakan kemampuan memecahkan masalah yang ada di masyarakat dan tentunya manfaat tersebut tidak terarah pada satu komponen melainkan juga pada beberapa substansi. Diharapkan penelitian ini memberikan masukan mengenai kualitas anggaran berbasis kinerja dan akuntansi keuangan daerah instansi sektor publik khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung serta dijadikan referensi peneliti selanjutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan *grand theory* berupa teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Widyantoro (2009) sebagai pendekatan dalam menganalisis implementasi *Performance Based Budgeting*. Anggaran umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa yang berupa susunan rencana tertulis yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi dalam periode tertentu.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bentuk dari instansi pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala yang menjadi pusat pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Kumorotomo (2005:103), menyatakan bahwa keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya ketika semuanya berjalan dengan transparan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan apa yang dianggarkan. Kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Bastian (2006:267).

Sistem penentuan anggaran yang berkembang pesat saat ini dan adalah sistem penganggaran yang berbasis kinerja. Penggunaan sistem informasi secara sistematis dapat dicapai dengan penerapan *performance-based budgeting* dalam kaitannya dengan anggaran organisasi sektor publik (Robinson dan Last, 2009). Anggaran berbasis kinerja dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:21).

Sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan dana atau keuangan daerah yang semakin besar dan beragam. Sehingga diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai penyedia informasi yang diperlukan untuk mengambil

langkah strategis dan keputusan dalam kebijakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dimana hasil dari sistem akuntansi tersebut dapat dijadikan referensi dan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian Silalahi (2012), Sandra (2014), dan Fathia (2017), menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja perangkat daerah dapat dipengaruhi oleh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh anggaran berbasis kinerja dan penerapan sistem akuntansi pemerintah.

Informasi tentang kinerja sangat diperlukan dalam mengukur penerapan suatu anggaran dengan hasil yang dicapai yang disebut dengan anggaran berbasis kinerja. Pemerintah memerlukan penyusunan anggaran berbasis kinerja untuk meyakinkan kepada masyarakat penggunaan dana memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hasil penelitian Silalahi (2012), Fathia (2017), dan Sari (2015) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap penilaian kinerja instansi pemerintah.

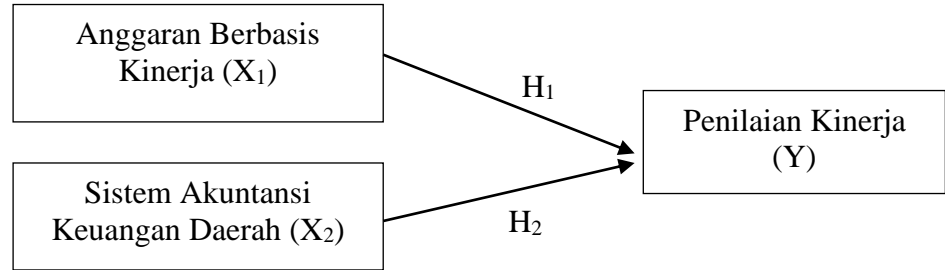
Dalam kegiatan pengambilan keputusan ekonomi yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu menetapkan suatu skema menyeluruh yang disusun saling berhubungan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan, yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan selanjutnya agar lebih baik dari hasil sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sandra (2014), Silalahi (2012) dan Fathia (2017) menyatakan bahwa kinerja instansi pemerintah dapat dipengaruhi dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penilaian kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Pengungkapan hasil kinerja pemerintah selama periode tertentu sangat diperlukan untuk menilai kinerja organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat mengingat anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan tersebut berasal dari masyarakat sehingga masyarakat perlu mengetahui apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraanya. Faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah. Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Berpikir
Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah



Sumber: Hasil pemikiran peneliti, 2019

Variabel Dependen sering disebut juga dengan istilah variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel independen yang dalam penelitian ini adalah penilaian kinerja instansi pemerintah (Y). Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen dimana dalam penelitian ini adalah: Anggaran berbasis kinerja (X1) dan Sistem akuntansi keuangan daerah (X2).

Menurut Sugiyono (2014: 80) populasi merupakan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh obyek atau subyek yang akan diteliti untuk dipelajari kemudian memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Kantor Dinas Kabupaten Badung sebanyak 1089 orang.

Penelitian ini menggunakan *non probability sampling* sebagai teknik penentuan sampel yang merupakan teknik pengambilan sampel dimana tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Tabel 3.1
Reponden Penelitian

No	Kriteria	Jumlah Karyawan
1	Pegawai pada Kantor Dinas di Kabupaten Badung	1089 Orang
2	Pegawai yang tidak menjabat sebagai Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Bendahara Umum, Bendahara Rutin, Kasubag Umum, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan, Kabag Keuangan pada Kantor Dinas di Kabupaten Badung	(900 Orang)
3	Pegawai yang tidak ikut terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran	(87 Orang)
	Total Sampel	102 orang

Jadi melihat tabel di atas, dari seluruh populasi sebanyak 1089 orang pegawai di Kantor Dinas di Kabupaten Badung yang memenuhi kriteria sebagai sampel sebanyak 102 orang. Sehingga penelitian menggunakan 102 orang sebagai responden.

Uji validitas, merupakan pengujian yang menggunakan *software* SPSS (*Statistic Package the Social Science*) for windows. Suatu instrumen dikatakan valid jika skor *pearson correlation* diatas 0,3 (Sugiyono, 2014 : 188). Uji reliabilitas, menggunakan teknik *one shoot* melalui uji *statistic croncbach alpha*. Dikatakan lolos uji reliabilitas jika nilai *croncbach alpha* > 0,70 dan jika < 0,70 maka dinyatakan tidak reliabel (Ghozali, 2016 : 47).

Uji Normalitas, menguji apakah model regresi berdistribusi normal dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* ini dengan melihat nilai signifikan jika lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas meregresikan antara variabel bebas dengan nilai absolut residualnya dengan uji glesjer. Data terbebas dari heteroskedastisitas ketika memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Uji Multikolonearitas, bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolonearitas dilihat dari besar VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonearitas adalah nilai *tolerance* > 0,01, atau sama dengan nilai VIF < 10.

Menurut Ghozali (2016: 99) uji statistik F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Analisis determinasi adalah sebuah analisis untuk menerangkan variasi variabel dependen menentukan seberapa jauh kemampuan model (Ghozali, 2016: 96). Besarnya koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 97).

Analisis ini menggunakan bantuan program komputer SPSS, besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dengan perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda. Dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

Y = Penilaian kinerja

α = Konstanta

β Koefisien = regresi

X_1 = Anggaran Berbasis Kinerja

X_2 = Sistem akuntansi keuangan daerah

e = Error

Menurut Ghozali (2016: 97) pengujian ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kriteria tingkat signifikansi 0,05 dimana jika nilai signifikansi $t < 0,05$, maka H_1 diterima dan jika nilai signifikansi $t > 0,05$, maka H_1 ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semi Loka yang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Badung pada Selasa, 25 Nopember 2008 menghasilkan kesepakatan bahwa Mangupura merupakan nama ibu kota Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Nomor 14 Tahun 2009 Perihal Persetujuan Penetapan Wilayah Ibu Kota dan nama Mangupura sebagai nama Ibu Kota Kabupaten Badung. Sejak saat itu ibu kota Kabupaten Badung resmi berpisah dengan wilayah Kota Denpasar dan berdiri sendiri di wilayah kecamatan Mengwi.

4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan terhadap instrumen penelitian dengan bantuan program SPSS *Version 22.0 for Windows* dapat dilihat Lampiran 3 penelitian ini. Dimana semua instrumen variabel dinyatakan valid dan

reliabel karena nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,30 dan koefisien alpha (α) lebih besar dari 0,6, sehingga layak dijadikan instrumen penelitian.

Hasil yang didapatkan dengan memakai uji *Kolmogorov-Smirnov*, data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2016: 61). Besar nilai signifikansi pada penelitian ini sebesar 0,051 > 0,05 maka memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan model regresi berdistribusi normal karena nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10 dan angka *tolerance* lebih dari dari 0,1. Hal ini berarti gejala multikolinearitas tidak terdapat dalam model regresi yang digunakan.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti gejala heteroskedastisitas tidak terdapat pada model regresi.

Berdasarkan hasil uji F (Lampiran 5), nilai F hitung sebesar 133,870 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung. Sehingga model layak digunakan.

Hasil analisis determinasi dalam penelitian ini dimana besarnya pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebesar 69,7% sedang sisanya 30,3% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Dengan demikian, anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi

keuangan daerah dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung.

Hasil analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung secara simultan.

Berdasarkan hasil regresi linier berganda diperoleh nilai konstanta (a) = 4,861 dan koefisien regresi (b_1) = 0,133 dan (b_2) = 0,698. Berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 4,861 + 0,133X_1 + 0,698X_2$$

Dari persamaan tersebut di atas, dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Dilihat dari nilai $a = 4,861$, (b_1) = 0,133 dan (b_2) = 0,698. Hal ini berarti apabila nilai dari keseluruhan variabel bebas (X) sama-sama nol (0) atau tidak meningkat, maka kinerja instansi pemerintah (Y) akan tetap sebesar 4,861.
- b. Dilihat dari nilai $b_1 = 0,133$. Hal ini berarti apabila nilai dari anggaran berbasis kinerja (X_1) meningkat, maka nilai kinerja instansi pemerintah (Y) juga meningkat sebesar 0,133, dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Dilihat dari nilai $b_2 = 0,698$. Hal ini berarti apabila nilai dari sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) meningkat, maka nilai kinerja instansi pemerintah (Y) juga meningkat sebesar 0,698, dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Dilihat dari nilai (b_1) = 0,133 dan (b_2) = 0,698. Hal ini berarti apabila nilai dari anggaran berbasis kinerja (X_1) dan sistem akuntansi keuangan daerah

(X_2) sama-sama meningkat maka kinerja instansi pemerintah (Y) juga meningkat sebesar satu satuan pada konstanta 0,831.

Hasil pengujian t-test pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung (Lampiran 5), dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Dari hasil t-test pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel anggaran berbasis kinerja sebesar 2,291 serta nilai signifikan uji t sebesar $0,024 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung, hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Dari hasil t-test pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 14,181 serta nilai signifikan uji t sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung, maka hipotesis kedua (H2) diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji t-test menunjukkan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,133 dan nilai t_{hitung} sebesar 2,291 serta nilai signifikan uji t sebesar $0,024 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Silalahi (2012), Fathia (2017), dan Sari (2015) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja instansi pemerintah.

Informasi tentang kinerja sangat diperlukan dalam mengukur penerapan suatu anggaran dengan hasil yang dicapai yang disebut dengan anggaran berbasis kinerja. Pemerintah memerlukan penyusunan anggaran berbasis kinerja untuk meyakinkan kepada masyarakat pengeluaran dana sesuai dengan perencanaan yang ingin dicapai dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji t-test menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,698 dan nilai t_{hitung} sebesar 14,181 serta nilai signifikan uji t sebesar $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sandra (2014), Silalahi (2012) dan Fathia (2017) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam kegiatan pengambilan keputusan ekonomi yang

menyangkut kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu menetapkan suatu skema menyeluruh yang disusun saling berhubungan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan, yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan selanjutnya agar lebih baik dari hasil sebelumnya.

SIMPULANDAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, maka kesimpulan yang berkaitan dengan pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah diperoleh koefisien regresi sebesar 0,133, nilai t_{hitung} sebesar 2,291 serta nilai signifikan uji t sebesar $0,024 < 0,05$, sehingga H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung.
2. Hasil analisis hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah diperoleh koefisien regresi sebesar 0,698, nilai t_{hitung} sebesar 14,181 serta nilai signifikan uji t sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung.

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan oleh Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung berkaitan dengan pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan anggaran berbasis kinerja pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung, disarankan dalam penyusunan APBD berbasis kinerja lebih melihat visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai instansi masing-masing sehingga penyusunan anggaran menghasilkan kinerja yang lebih baik dan dapat mewujudkan tujuan instansi.
2. Terkait dengan sistem akuntansi keuangan daerah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung, disarankan kepada pegawai dalam penyusunan anggaran dan keuangan daerah tetap menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga penyusunan anggaran dapat dikontrol baik penyusunan, penerapan dan realisasinya.
3. Terkait dengan kinerja instansi pemerintah pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung, disarankan lebih mensosialisasikan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan penyusunan anggaran tersebut, sehingga anggaran tepat sasaran dan mewujudkan tujuan instansi.